



PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Yusni^{1*}, Ririn Apriana², Rosma Ndiak³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk
Corresponden Email: buliayusni@gmail.com¹

Abstract

*The purpose of this study is to determine the effect of the Implementation of Government Accounting Standards and Financial Supervision on the Quality of Financial Reports at the Banggai Regency Human Resources Development Agency Office. The analysis method used in this study is a quantitative analysis method, the analysis tool used to analyze data using SPSS 25. While the data sources in this study use primary data and secondary data. Based on the results of data analysis using SPSS 25, it shows that the results of the t-test show that all independent variables, namely the Implementation of Government Accounting Standards (X1), and Financial Supervision (X2), have a partial influence on the Quality of Financial Reports (Y) at the Banggai Regency Human Resource Development Agency Office. From the results of the ANOVA (analysis of variance) test or F test, the F-count is 8.781 and the F-table is 3.29. With this comparison, it can be seen that the F-count = 8.781 > F-table value = 3.29, which means that it simultaneously has a positive and significant effect, and from the results of the study, it is partially shown that the variable for the application of government accounting standards (X1) has a regression coefficient value of 0.478 and the t-test value shows a t-count value = 2.514 > from the t-table value = 2.034. This shows that the variable for the application of government accounting standards (X1) has an effect on the quality of financial reports (Y) and the financial supervision variable (X2) has a regression coefficient value of 0.411 and a value of The t-test shows the t-count value = 2.881 > from the t-table value = 2.034, this shows that partially the financial supervision variable has a positive and significant influence on the quality of financial reports (Y) at the Banggai Regency Human Resources Development and Personnel Agency, **Keywords:** Implementation of Government Accounting Standards, Financial Supervision, Quality of Financial Reports*

Abstrak

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan SPSS 25. Sementara sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa Dari hasil uji t didapatkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Penerapan standar akuntansi pemerintah (X1), dan Pengawasan Keuangan (X2), mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kualitas laporan Keuangan (Y) Pada Kantor Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai, Dari hasil uji ANOVA (*analysis of variant*) atau uji F didapatkan F-hitung sebesar 8.781 dan F-tabel sebesar 3,29 dengan perbandingan tersebut berarti dapat diketahui bahwa F-hitung = 8.781 > nilai F-tabel = 3,29 yang berarti secara simultan berpengaruh positif dan signifikan, dan Dari hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,478 serta nilai Uji-t menunjukkan nilai t-hitung = 2,514 > dari nilai t-tabel = 2,034 ini menunjukkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dan variabel pengawasan keuangan (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,411 serta nilai Uji-t menunjukkan nilai t-hitung = 2,881 > dari nilai t-tabel = 2.034, hal ini menunjukkan secara parsial variabel pengawasan keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai,

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan. Karena jika faktor-faktor tersebut kurang diterapkan secara maksimal maka dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya. Dalam rangka pertanggung-jawaban tersebut diperlukan penerapan kualitas pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan keputusan.

Laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan selama satu periode harus disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut PP No 71 Tahun 2010, terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam melakukan dan membuat penyusunan dan laporan Keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola pemerintahan di daerah harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat dalam bentuk penyampaian pelaporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun laporan keuangannya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Salah satunya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai. Namun berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubbag Keuangan BKPSDM Kab. Banggai laporan keuangan yang disusun oleh BKPSDM hanya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai tidak sepenuhnya menerapkan PP no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sehingga membuat laporan keuangan tidak berkualitas. Seharusnya pemerintah memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat sehingga laporan keuangan bisa berkualitas. Penelitian Irawati (2020) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penulis juga menambahkan variabel Pengawasan dimana pengawasan adalah suatu cara yang sistematis untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan, (Yosa, 2010). Semakin Baik pengawasan yang dilakukan maka kualitas pada penyusunan laporan keuangan akan semakin baik. Penelitian Irawati (2020) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian Mawuntu, dkk (2020) Pengawasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Permendari No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri atas:

1. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) menyajikan saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

5. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Menurut Anugriany (2017) pengawasan keuangan dalam kinerja pemerintah mencakup segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Menurut Harahap dalam Irawati (2020) menyatakan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, prinsip yang dianut dan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Adapun tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan

diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Irawati (2020) mengemukakan secara umum terdapat Sembilan Karakteristik pengawasan keuangan atau pengendalian yang efektif, yaitu Objektif dan Komprehensif (*Objektive and Comprehesible*), Tepat waktu (*Timely*), Secara Organisasi realitis (*Organizationally realistic*), Akurat (*Accurate*), Secara Ekonomi realistik (*Economically Realistic*), Fleksibel (*Flexible*)

Akuntansi pemerintahan menurut Rachmat (2010) merupakan sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan yang berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.

Menurut Rachmat (2010) karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam suatu informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat tiga karakteristik yang merupakan prasyarat normal yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam proses pengambilan Keputusan dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki syarat yaitu Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka di masa lalu dan Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi yang terdapat di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Suatu informasi mungkin saja relevan, namun jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai yang berlokasi di Jalan Dr Moh Hatta Kel. Tombang Permai. Jenis pelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis yang sekurang-kurangnya memiliki dua variabel untuk dihubungkan (Sugiyono, 2012:10). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (X1) yaitu Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan dan (X2) yaitu Pengawasan Keuangan. Serta variabel dependen atau terikat (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Jenis data dalam penelitian ini diperlukan yaitu Data Kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitaif yaitu data yang dapat dihitung atau dinyatakan dengan bentuk angka sebagai data yang banyak dipergunakan dalam penelitian. Dan Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara ataupun quisioner dimana gambaran keadaan umum Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang menjadi objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Data Primer, yaitu data yang bersumber atau diperoleh dari hasil observasi, Kuesioner dan wawancara langsung dengan pimpinan dan beberapa orang pegawai, dan Data Sekunder, yaitu data yang bersumber atau diperoleh berupa informasi dalam pustaka, laporan yang tertulis, serta bahan-bahan dokumentasi lainnya tentang Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.

HASIL PENELITIAN

Pengujian pengaruh signifikan keseluruhan variabel

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai penulis telah mengumpulkan beberapa informasi yang mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan memanfaatkan informasi tersebut kedalam model (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif. diperoleh analisis yang lengkap dan akurat dan menggunakan SPSS.25. Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis dapat dilihat dari hasil olah data SPSS yang sudah dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Statistik

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	P (Sig)	Ket
Constant	0,752			
Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan (X1)	1,172	2,514	,000	Signifikan
Pengawasan Keuangan (X2)	0,205	2,881	,004	Signifikan
R = 0,743				

$r^2 = 0,719 = 71,9 \%$				
$F_{hitung} = 8,781$			0,000	

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan perhitungan hasil analisis regresi linier berganda antara variabel independen Kepemimpinan (X1) dan Kompetensi (X2) dan variabel dependen yaitu Kinerja Pegawai (Y) Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, yang dibantu dengan menggunakan *SPSS For Windows* Versi 25.00, maka didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,752 + 1,172X_1 + 0,205X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar **0,752** dapat diartikan bahwa apabila variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pengawasan Keuangan tidak mengalami perubahan (*Konstan*) maka Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai akan mengalami penurunan sebesar **0,752**
- b. β_1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar **1,172** mempunyai arti bahwa apabila nilai dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai ditingkatkan satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar sebesar **1,172**
- c. β_2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar **0,205** mempunyai arti bahwa apabila nilai dari Pengawasan Keuangan (X2) Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai ditingkatkan satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan akan meningkat sebesar **0,205**.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengolahan data *SPSS Versi 25.0* pada tabel ANOVA^a, dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Hasil *SPSS Uji F*
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96.903	2	48.452	8.781	.001 ^b
Residual	182.097	33	5.518		
Total	279.000	35			

Sumber : Hasil *SPSS*, 2024

Hasil pengujian secara simultan (Uji F), untuk membuktikan hal tersebut maka terlebih dahulu tentukan tingkat derajat kebebasan $Dk = n - k - 1 = 30 - 2 - 1 = 27$ maka diperoleh F-tabel = 3,29, menurut teori statistik apabila F-hitung > F- tabel maka variabel berpengaruh secara signifikan. Dengan perbandingan tersebut berarti dapat diketahui bahwa F-hitung = 8.781 > nilai F-tabel = 3,29 P- Value = 0,01 < $\alpha = 0,05$ yang berarti berpengaruh secara signifikan, berarti melalui uji F, dapat dikatakan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), pengawasan keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), pengawasan keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diterima atau hipotesis terbukti.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya secara parsial pengaruh antar variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), pengawasan keuangan (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Untuk menguji apakah setiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji t hitung dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.564	5.915		.772	.446
Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)	.478	.190	.359	2.514	.017
Pengawasan Keuangan (X2)	.411	.143	.411	2.881	.007

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS 23, 2022

Berdasarkan Tabel 3 di atas hasil t-hitung pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel ($2,514 > 2,034$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,017 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan atau dengan kata lain (H_{a1}) diterima.
2. Variabel pengawasan Keuangan (X2) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari nilai t-tabel

(2,881 > 2.034) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan atau dengan kata lain (H_0) diterima.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pengawasan Keuangan (X2) terhadap Kualitas laporan keuangan. Dari Uji ANOVA (*Analysis of Variance*) atau Uji-F didapat Fhitung sebesar 3,29 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 Ini berarti probabilitas lebih kecil dari 0,05. Untuk membuktikan hal tersebut maka dibandingkan antara Fhitung dan Ftabel. dalam penelitian ini nilai F-hitung = 8.781 > nilai F-tabel = 3,29, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), pengawasan keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian diperoleh F-hitung > F-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Jika dilihat dari tanggapan responden pernyataan pada kualitas laporan keuangan frekuensi terbanyak yaitu pada pernyataan “Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan. dan Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material. Artinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai telah dalam menyusun laporan keuangan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah melakukan Pengawasan dengan baik sehingga Kualitas Laporan Keuangan menjadi baik. Semakin instansi pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dan melakukan pengawasan pada laporan keuangannya maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,478 serta nilai Uji-t menunjukkan nilai t-hitung = 2,514 > dari nilai t-tabel = 2,034, hal ini menunjukkan secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, sehingga hipotesis pertama terbukti.
2. Berdasarkan hasil penelitian variabel pengawasan keuangan (X2) memiliki nilai koefisien regresi

- sebesar 0,411 serta nilai Uji-t menunjukkan nilai t-hitung = 2,881 > dari nilai t-tabel = 2.034, hal ini menunjukkan secara parsial variabel pengawasan keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, sehingga hipotesis pertama terbukti.
3. Berdasarkan hasil uji F, nilai F-hitung = 8.781 > F-tabel = 3,29, hal ini menunjukkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, sehingga hipotesis kedua terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Setia, D. N. K. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Peran Internal Audit, Efektifitas Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Studi pada SKPD Kabupaten Tabanan).
- Ghozali Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Harahap, S.S. (2011). *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Cet.11. Rajawali Pers: Jakarta
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 9(2), 2019.
- Irawati, N, B (2020) Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar*.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPEF. Yogyakarta
- Mawuntu, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi. (2020) Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara) *Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 2020, 260-268
- Nurlaila. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
- Omasrianto, dkk. (2017). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan, Audit Internal dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Universitas Halu Oleo. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 2(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Cet.1. Pustaka Setia: Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Kesebelas, CV. Alfabeta: Bandung